

EFEKTIFITAS STIMULUS KEBIJAKAN?

Oleh: Mudrajad Kuncoro

Sumber:

SUARA PEMBARUAN

2 Februari 2008

Krisis keuangan global ternyata memberi pelajaran bahwa kapitalisme di banyak negara maju menjadi *state capitalism*, kapitalisme negara. Negara menggelontorkan dana milyaran dolar untuk menyelamatkan perusahaan global yang berasal dari negaranya masing-masing. Ini menimbulkan pertanyaan seberapa jauh stimulus kebijakan efektif meredam krisis dan membawa dampak positif terhadap ekonomi rakyat?

Di Presiden Amerika Serikat (AS), Presiden Barack Obama menyatakan, 75% dari rencana paket stimulus ekonomi senilai US\$ 825 miliar akan dibelanjakan selama 18 bulan ke depan atau lebih cepat dari target awal dua tahun. Pemerintah AS juga akan membeli surat utang jangka pendek yang macet dengan dana talangan untuk menyelamatkan perusahaan besar dan bank demi meredam krisis berkepanjangan.

Di Eropa, pemerintah Inggris menjamin utang surat berharga jangka pendek dengan nilai US\$250 milyar dan 200 milyar pounsterling untuk pinjaman jangka pendek perbankan. Pemerintah Rusia memberi suntikan dana US\$37 milyar kepada bank-bank besar. Pemerintah Swedia menyuntik dana US\$702 juta dan meminjamkan dana sebesar US\$37 kepada bank besar. Pemerintah Belanda mengumumkan menggelontorkan dana 11,2 milyar euro kepada bank yang hampir bangkrut.

Di Indonesia, sejauh mana respons kebijakan pemerintah dan BI? Presiden SBY menegaskan, pemerintah siap mengatasi berbagai kemungkinan yang terjadi sebagai dampak dari krisis keuangan dunia dengan menyampaikan tujuh prioritas perekonomian Indonesia 2009, yaitu: membatasi pengangguran baru akibat krisis keuangan, mengelola inflasi pada batas tertentu, dan menjaga pergerakan sektor riil dengan insentif fiskal, berusaha mempertahankan daya beli masyarakat dengan menaikkan gaji, melindungi ekonomi kaum miskin, memelihara kecukupan pangan dan energi, serta memelihara pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana arah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter? BI pada Oktober 2008 lalu telah menurunkan giro wajib minimum (GWM) dari 9,08% menjadi 7,5% untuk menghindari ketatnya likuiditas karena krisis keuangan global. Pada Januari 2009 lalu *BI rate* diturunkan sebesar 50 basis poin menjadi 8,75% seiring dengan menurunnya tekanan inflasi di dalam negeri sebagai akibat dari turunnya harga komoditi, pangan dan energi dunia. Baru-baru ini, Gubernur BI mengumumkan stimulus ekonomi dengan mengeluarkan delapan kebijakan. Intinya, memberi keleluasaan penyaluran kredit dan memperkuat sistem perbankan nasional. Salah satu fokus kebijakannya ialah merelaksasi aturan perbankan dalam pemberian kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Risiko kredit UMKM yang dijamin asuransi kredit berstatus BUMN diturunkan dari 50% menjadi 20%. BI juga menghapus

kewajiban bank menyisihkan penghapusan aktiva untuk properti yang terbengkalai di bawah 50%, relaksasi ini membuat modal bank tetap terjaga dalam mendukung penyaluran kredit. Untuk mengatasi ketatnya likuiditas BI mendorong bank agar memperluas jaringan kantor agar dapat dengan lebih mudah menghimpun dana masyarakat.

Bagaimana dengan stimulus fiskal? Patut disayangkan, dalam rencana stimulus fiskal yang akan diberikan, pemerintah berubah-ubah dalam mengumumkan besaran nilainya. Di pengujung tahun lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan, selain stimulus yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar 12,5 triliun, pemerintah memberi stimulus tambahan sekitar Rp 16-20 triliun, sehingga totalnya bisa mencapai Rp 32 triliun. Tak lama setelah itu, Presiden SBY menyatakan total stimulus tahun ini bisa mencapai Rp 50 triliun. Jumlah ini dipertegas Menkeu dalam jumpa pers dengan para pemimpin redaksi media massa. Pertengahan Januari lalu, nilai stimulus direvisi dengan pemangkasan yang cukup signifikan, menjadi tinggal Rp 27,7 triliun. Bahkan Pemerintah meralat sektor-sektor yang berhak mendapat stimulus, terutama PPN yang ditanggung pemerintah, dari semula 17 sektor bakal mendapat jatah, tiba-tiba pemerintah hanya memutuskan tiga sektor, sehingga 14 sektor dibatalkan. Tanggal 27 Januari lalu, Menkeu dalam rapat dengan Komisi XI DPR, mengumumkan besaran stimulus yang 'membengkak' jadi Rp 71,3 triliun.

Paket stimulus fiskal Rp 71,3 triliun, bila dicermati, didominasi oleh fasilitas pajak, baik berupa keringanan pajak maupun pajak yang ditanggung pemerintah, dan subsidi kepada dunia usaha. Stimulus fiskal dibagi dalam tiga kelompok utama. Pertama adalah penghematan pembayaran pajak (*tax saving*) berupa penurunan tarif PPh Badan, orang pribadi dan PTKP sebesar Rp 43 triliun. Kedua, subsidi pajak kepada dunia usaha dalam PPN eksplorasi migas serta minyak goreng, bea masuk bahan baku & modal, PPh karyawan, dan PPh panas bumi, dengan nilai sebesar Rp 13,3 Triliun. Ketiga, subsidi dan belanja negara kepada dunia usaha/lapangan kerja sebesar Rp 15 Triliun. Yang terakhir ini berupa penurunan harga solar, diskon beban puncak industri, tambahan belanja infrastruktur, perluasan PNPM.

Banyak yang menyangsikan efektivitas stimulus fiskal ini. Pertama, dengan pendekatan berupa keringanan dan subsidi pajak, sebenarnya pemerintah mengambil posisi pasif dalam mengantisipasi krisis. Sebagai ilustrasi, subsidi harga obat generik dan minyak goreng serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai tidak signifikan dalam memperkuat daya beli masyarakat miskin atau mendorong konsumsi dalam negeri. Hal itu disebabkan harga kebutuhan pokok dalam negeri maupun produk manufaktur tidak secara otomatis turun dengan adanya subsidi harga tersebut. Subsidi pajak menjadi tidak efektif jika diberikan kepada sektor-sektor usaha yang sudah tidak layak lagi menjadi obyek pajak karena mereka sudah terancam bangkrut. Apalagi gejala deindustrialisasi, dalam bentuk penutupan perusahaan dan pengurangan tenaga kerja, sudah mulai terlihat

Kedua, kapan dana stimulus ini akan dikucurkan dan dengan prioritas ke sektor/daerah mana saja? Masalah-masalah teknis dan nonteknis yang berkaitan dengan penyerapan anggaran harus diperbaiki sebelum stimulus dikeluarkan. Keberhasilan stimulus sangat bergantung pada kecepatan daya serap dan pencairan dana stimulus tersebut. Stimulus harus diberikan sedini mungkin di awal tahun agar dapat terserap seluruhnya ke dalam perekonomian dan memberikan dampak pengganda yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan PHK.

Ketiga, pemerintah tidak banyak mengucurkan “dana segar” (*direct stimulus*) guna menciptakan program dan proyek yang menggerakkan perekonomian. Sebab, dana segar ini sifatnya langsung dapat bisa dirasakan oleh rakyat, sehingga mendongkrak daya beli dan menciptakan lapangan kerja baru. Bagi pelaku bisnis di sektor riil nampaknya dibutuhkan stimulan kebijakan yang lebih mendasar. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran nampaknya akan dirasakan pada semester pertama 2009. Dalam kolom saya di harian ini tanggal 2 Desember 2008, saya mengusulkan beberapa stimulan kebijakan, antara lain: Pertama, perlunya insentif fiskal bagi industri yang berorientasi ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja. Diturunkannya pajak ekspor dan bea masuk untuk bahan baku dan penolong yang masih diimpor dari luar negeri akan sangat membantu industri di tanah air. Kedua, usulan untuk memberi stimulus bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) layak untuk diperhatikan.

Keeempat, pentingnya dialog dan kesepakatan antara pemerintah dan pengusaha untuk fokus pemberian stimulus fiskal kepada sektor mana saja. Pemerintah perlu menggandeng Kadin dan semua asosiasi bisnis dalam penentuan sektor yang perlu diberikan stimulus tambahan.

Kelima, pemerintah perlu mengajak pemda kabupaten, kota, dan provinsi dalam menyusun stimulus kebijakan yang lebih komprehensif. Praktik realisasi APBN dan APBD selama ini lebih bernuansa sektoral, tapi mengabaikan perbedaan masalah dan kebutuhan antardaerah. Banyak dana daerah yang masih disimpan dalam bentuk SBI menunjukkan: (1) betapa masih adanya peluang pembiayaan; (2) belum adanya *sense of crisis* bagi kebanyakan pemda di Indonesia.

Semoga pemerintah pusat, pemda, BI, dan Kadin menyadari bahwa stimulus kebijakan tidak hanya fiskal. Kini dibutuhkan tidak hanya *policy mix* kebijakan fiskal dan moneter, namun koordinasi kebijakan di lingkungan metaekonomi. Koordinasi lintas sektor dan daerah amat dibutuhkan karena pola perencanaan Indonesia bersifat sektoral dan melibatkan 500-an kabupaten/kota serta 33 provinsi. Kalau RA Kartini menulis ”Habis Gelap Terbitlah Terang”, semoga nanti kita menyaksikan Habis Krisis Terbitlah Kebangkitan ekonomi Indonesia.